



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku pencipta dan pengelola arsip, perlu adanya Pedoman Penyusutan Arsip;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyusutan arsip merupakan kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Kantor Arsip Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip In Aktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, Pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Arsip In Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
8. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kantor.
10. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta Arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
11. Unit Pengolah adalah Perangkat Daerah pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
12. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
13. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan Arsip serta keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip.
14. Arsip Tekstual adalah informasi yang direkam atau dicatat pada lembaran kertas yang dapat berupa korespondensi maupun non korespondensi.

15. Arsip Kartografi adalah informasi yang berupa gambaran peta, termasuk gambar-gambar yang berkaitan dengan kearsitekturan.
16. Arsip Bentuk Khusus adalah informasi yang terekam dalam bentuk audio visual yang dapat berupa gambar statis, citra bergerak dan rekaman suara.
17. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman Penyusutan Arsip dan penyelamatan Arsip.
18. Daftar Arsip adalah daftar sekurang-kurangnya berisi nomor urut, series atau uraian berkas, tahun pembuatan arsip, jumlah arsip, dan keterangan yang digunakan sebagai sarana penemuan kembali dan Penyusutan Arsip.
19. Pemindehan Arsip adalah kegiatan pemindehan Arsip In Aktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan
20. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Penyerahan Arsip adalah kegiatan menyerahkan Arsip Statis oleh pencipta arsip ke Lembaga Kearsipan.
22. Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik /nilai instrinstiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi.
23. Nilai Guna Arsip adalah nilai guna yang didasarkan pada kegunaan bagi kegiatan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan pada umumnya.

BAB II  
PENYUSUTAN ARSIP

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemindahan Arsip In Aktif dari Unit Pengolah  
ke Unit Kearsipan

Pasal 2

Pemindahan Arsip In Aktif dilakukan sebagai berikut:

- a. pemindahan Arsip In Aktif yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan; dan
- b. pemindahan Arsip In Aktif yang memiliki retensi 10 (sepuluh) tahun dilakukan Perangkat Daerah ke KAD.

Pasal 3

- (1) Pemindahan Arsip In Aktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dilaksanakan oleh pengelola Arsip yang berkedudukan di bawah kepala Unit Pengolah dan kepala Unit Kearsipan setelah melewati Retensi Arsip aktif.
- (2) Arsip In Aktif yang akan dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari beberapa jenis Arsip yaitu:
  - a. Arsip Tekstual;
  - b. Arsip Kartografi; dan
  - c. Arsip Bentuk Khusus.

Pasal 4

- (1) Pemindahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. memiliki retensi akumulatif kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
  - b. telah habis masa simpan sebagai Arsip aktif berdasarkan JRA; dan
  - c. tidak digunakan lagi sebagai bahan pembuktian sebagai bahan penegakan hak dan kewajiban atau kepentingan lain bagi Unit Pengolah.
- (2) Pelaksanaan Pemindahan Arsip In Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penandatanganan berita acara dan dilengkapi daftar Arsip yang akan dipindahkan.

## Pasal 5

Pelaksanaan Pemindahan Arsip In Aktif dilakukan dengan:

- a. pemeriksaan Arsip;
- b. pemindahan Arsip;
- c. penataan Arsip; dan
- d. Berita acara Pemindahan Arsip.

## Pasal 6

- (1) Pemeriksaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan pada daftar Arsip untuk mengetahui Arsip yang akan dipindahkan.
- (2) Pemindahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan hasil pemeriksaan yang dituliskan dalam laporan pemeriksaan sebagai dasar pembuatan berita acara Pemindahan Arsip.
- (3) Penataan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Arsip yang dipindahkan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan yang ditata dan dikelola sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- (4) Berita Acara Pemindahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengolah dan Pimpinan Unit Kearsipan.

## Bagian Kedua

Tata Cara Pemindahan Arsip In Aktif dari Perangkat Daerah ke Kantor Arsip Daerah

## Pasal 7

- (1) Arsip In Aktif yang memiliki retensi 10 (sepuluh) tahun atau lebih dipindahkan dari Perangkat Daerah ke KAD.
- (2) Pemindahan Arsip In Aktif yang memiliki retensi 10 (sepuluh) tahun atau lebih dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki retensi akumulatif Arsip 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
  - b. telah habis masa simpan sebagai Arsip aktif berdasarkan JRA; dan
  - c. tidak digunakan lagi sebagai bahan pembuktian sebagai bahan penegakan hak dan kewajiban atau kepentingan lain bagi Unit Pengolah.

- (3) Pemindahan dilakukan dalam kondisi tertata, baik fisik maupun informasinya, dilengkapi dengan daftar arsip yang dipindahkan dan dibuat bentuk acara Pemindahan Arsip In Aktif.

#### Pasal 8

- (1) KAD melakukan pengelolaan Arsip In Aktif yang berasal dari Perangkat Daerah dan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi Arsip.
- (2) Pengelolaan Arsip In Aktif dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau Petugas Pengelola Arsip.
- (3) Kepala KAD dan kepala Unit Kearsipan yang membawahi fungsi penyimpanan Arsip In Aktif pada KAD bertanggungjawab atas penataan Arsip In Aktif di KAD.

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai pelaksanaan Pemindahan Arsip In Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap pelaksanaan pemindahan Arsip In Aktif dari Perangkat Daerah ke KAD.

#### Bagian Ketiga

#### Penyusutan Arsip

#### Pasal 10

- (1) Penyusutan Arsip dilaksanakan berdasarkan JRA.
- (2) Pelaksanaan Penyusutan Arsip meliputi:
  - a. pemindahan Arsip In Aktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
  - b. pemusnahan Arsip In Aktif yang telah habis retensinya dan tidak memiliki Nilai Guna Arsip; dan
  - c. penyerahan Arsip Statis dari Unit Kearsipan Perangkat Daerah ke KAD.

#### Pasal 11

- (1) Arsip In Aktif yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun dilakukan Penilaian melalui Unit Pengolah ke Unit Kearsipan yang hasilnya dituangkan dalam Daftar Arsip usul pindah.

- (2) Arsip In Aktif yang memiliki Retensi Arsip 10 (sepuluh) tahun dilakukan Penilaian Arsip melalui Perangkat Daerah ke KAD yang hasilnya dituangkan dalam Daftar Arsip usul pindah.
- (3) Pemindehan Arsip In Aktif dilaksanakan berdasarkan:
  - a. penyeleksian Arsip;
  - b. penataan Arsip;
  - c. pembuatan daftar Arsip usul pindah; dan
  - d. pembuatan berita acara.

## Pasal 12

- (1) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dengan JRA kurang dari 10 (sepuluh) tahun dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan dan pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan persetujuan Bupati.
- (2) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di KAD.
- (3) Arsip yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
  - a. tidak memiliki Nilai Guna Arsip;
  - b. telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
  - c. tidak ada Peraturan Perundang-Undangan yang melarang; dan
  - d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
- (4) Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi lebih dari 10 (sepuluh) tahun dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. penilaian Arsip oleh panitia pemusnahan Arsip;
  - b. permintaan persetujuan dari Pimpinan Pencipta Arsip;
  - c. penetapan Arsip yang akan dimusnahkan; dan
  - d. pelaksanaan pemusnahan Arsip.
- (5) Dalam hal Arsip keuangan, diusulkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Arsip Kepegawaian diusulkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terlebih dahulu dilakukan sebelum diajukan ke Lembaga Arsip Nasional untuk memperoleh persetujuan.

### Pasal 13

- (1) Penyerahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Arsip bernilai guna permanen yang telah habis masa simpanannya dan dinyatakan tidak operasional di Instansi penciptanya.
- (2) Arsip Statis dapat diserahkan ke KAD berdasarkan:
  - a. telah habis retensinya dan berketerangan permanen berdasarkan JRA;
  - b. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara; dan/atau
  - c. memiliki nilai guna kesejahteraan.

### Pasal 14

Penyusutan berdasarkan JRA dilakukan secara teratur dengan cara:

- a. menyeleksi Arsip In Aktif untuk dituangkan dalam daftar atau Arsip yang dipindahkan;
- b. menyeleksi Arsip yang akan musnah untuk dituangkan dalam daftar Arsip yang akan dimusnahkan;
- c. menyeleksi Arsip yang akhirnya permanen untuk dituangkan dalam daftar Arsip yang diserahkan; dan
- d. menyeleksi Arsip yang akhirnya dinilai kembali dituangkan dalam daftar Arsip yang dinilai kembali.

### Pasal 15

- (1) Arsip In Aktif Perangkat Daerah yang berada di KAD dilakukan pemilahan berdasarkan JRA untuk menentukan status sebagai Arsip Statis.
- (2) Arsip yang telah habis masa retensi dan dinyatakan permanen didaftar sebagai Arsip Statis.
- (3) Pemandahan Arsip In Aktif menjadi Arsip Statis dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah sebagai pencipta Arsip dan kepala KAD.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penyerahan Arsip Statis  
Pasal 16

Arsip Statis diserahkan kepada KAD dengan syarat:

- a. telah habis retensinya dan berketerangan permanen berdasarkan JRA;
- b. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara; dan/ atau
- c. memiliki nilai guna kesejahteraan.

Pasal 17

- (1) Pedoman Penyusutan Arsip meliputi Unit Kearsipan, mekanisme Penyusutan Arsip dalam pelaksanaan Penyusutan Arsip.
- (2) Pelaksanaan Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III  
SUMBER DAYA KEARSIPAN

Pasal 18

Sumber daya kearsipan terdiri dari:

- a. unit kearsipan;
- b. unit pengolah
- c. sumber daya Manusia kearsipan; dan
- d. sarana dan prasarana kearsipan.

Pasal 19

- (1) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan KAD yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan.
- (2) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. unit kearsipan I; dan
  - b. unit kearsipan II.

- (3) Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan KAD.
- (4) Unit Kearsipan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unit kearsipan pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 20

Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap Pencipta Arsip;
- b. mengelola Arsip In Aktif yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan pemusnahan Arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna; dan
- d. memberikan persetujuan dan pemantauan pelaksanaan Penyusutan Arsip pada Unit Kearsipan II.

#### Pasal 21

Unit Kearsipan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengarahkan, mengendalikan, dan menata Arsip Dinamis pada Unit Pengolah;
- b. melaksanakan koordinasi kearsipan dengan Unit Kearsipan I;
- c. mengelola Arsip in Aktif dari Unit Pengolah;
- d. melaksanakan pemusnahan Arsip;
- e. melaksanakan Pemindahan Arsip In Aktif yang mempunyai retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun ke KAD (Unit Kearsipan I);
- f. melaksanakan penyerahan Arsip Statis oleh Pimpinan Pencipta Arsip kepada KAD; dan
- g. melaporkan kegiatan Penyusutan Arsip pada Unit Kearsipan I (KAD).

#### Pasal 22

- (1) Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tanggungjawab mengelola Arsip Dinamis In Aktif kepada Unit Kearsipan.

- (2) Unit Pengolah pada Unit Kearsipan I merupakan Unit Kerja di KAD.
- (3) Unit Pengolah pada Unit Kearsipan II merupakan Unit Kerja di Perangkat Daerah.

### Pasal 23

- (1) Sumber daya manusia kearsipan sebagaimana dalam Pasal 18 huruf e, terdiri dari:
  - a. Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Kepala Unit Kearsipan;
  - c. Arsiparis; dan
  - d. Petugas pengelola Arsip.
- (2) Kepala KAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusutan arsip.
- (3) Kepala Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program kebijakan bidang kearsipan;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang kearsipan serta pengelolaan sumber daya manusia kearsipan; dan
  - c. melakukan pembinaan kearsipan kepada Unit Pengolah.
- (4) Arsiparis sebagaimana pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
  - a. menjaga terciptanya Arsip;
  - b. menjaga ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
  - c. menjaga terwujudnya pengelola Arsip yang handal dan pemanfaatan Arsip sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - d. menjaga keamanan dan keselamatan Arsip yang berfungsi untuk menjamin Arsip yang berkaitan dengan hak keperdataan;
  - e. menjaga keselamatan dan kelestarian Arsip; dan
  - f. menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang otentik dan terpercaya.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Arsiparis di KAD atau Perangkat Daerah, pelaksanaan dapat dilakukan oleh pelaksana pengelola Arsip.

#### Pasal 24

Sarana dan prasarana kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:

- a. tempat penyimpanan Arsip aktif;
- b. tempat penyimpanan Arsip In Aktif;
- c. tempat penyimpanan Arsip Statis; dan
- d. tempat penyimpanan Arsip Vital.

#### Pasal 25

Sarana dan prasarana kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:

- a. gedung;
- b. ruangan; dan
- c. peralatan.

#### Pasal 26

- (1) Penyusutan Arsip dilaksanakan oleh tim penilai yang terdiri dari:
  - a. Kepala KAD/kepala Perangkat Daerah;
  - b. Unit Pengolah;
  - c. Unit Kearsipan; dan
  - d. Arsiparis.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kelengkapan berkas penyusutan Arsip;
  - b. menilai arsip yang dipilah, dimusnahkan dan diserahkan;
  - c. memberikan Peilaian Arsip yang akan dilakukan penyusutan Arsip;
  - d. memberikan pertimbangan atas permohonan penyusutan Arsip kepada kepala Perangkat Daerah; dan
  - e. membuat daftar Arsip dan berita acara hasil penilaian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 31 DESEMBER 2019

BUPATI KEPULAUAN ARU



JOHANGONGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 31 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN  
HUKUMDAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 38 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP

PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP

A. Pemindahan Arsip Inaktif

Pemindahan Arsip Inaktif dilakukan sebagai berikut:

1. Pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan II.

Pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun adalah memindahkan Arsip Aktif yang sudah memasuki fase Inaktif yang mempunyai masa simpan dibawah 10 (sepuluh) tahun dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan II.

Prosedur pelaksanaannya sebagai berikut:

Unit Pengolah

a. Memeriksa Arsip

- 1) Menyeleksi Arsip Aktif yang dimiliki oleh Unit Pengolah dengan cara memilah berkas berdasarkan tahun penciptaan dan disandingkan dengan masa simpan yang tercantum dalam JRA. Apabila terdapat berkas yang melewati masa simpan pada periode Arsip Aktif dan frekuensi penggunaannya sudah menurun, maka berkas tersebut dapat dipisahkan untuk dipindahkan ke Unit Kearsipan II sebagai Arsip Inaktif.
- 2) Memeriksa isi berkas, pisahkan Arsip dan NonArsip, blanko, duplikasi, dan sebagainya untuk dipisahkan dan dimusnahkan.
- 3) Kelompokkan Arsip Aktif yang akan diusulkan untuk dipindahkan sesuai klasifikasi Arsip.

b. Mendaftar Arsip

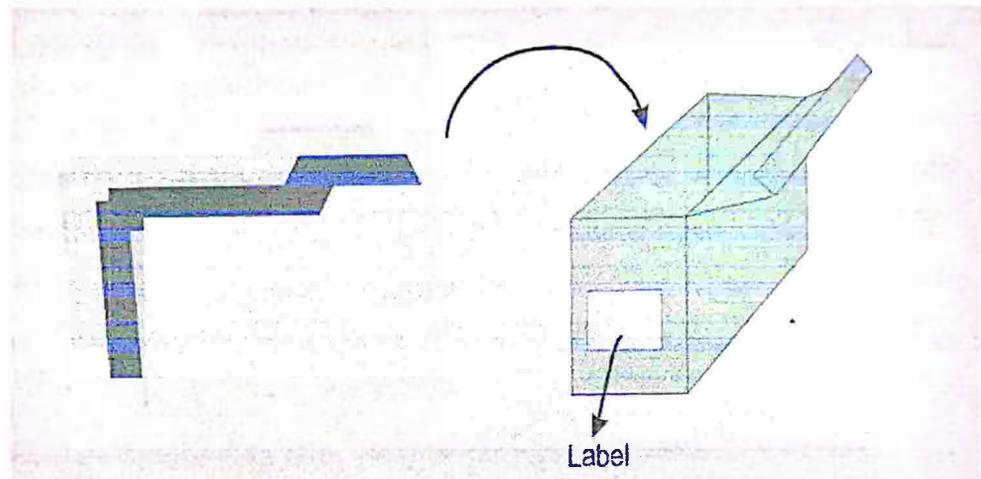
- 1) Mencatat Arsip Aktif hasil pemeriksaan ke dalam formulir Daftar Arsip yang dipindahkan sesuai dengan penataan Arsip semula ketika masih dalam periode Arsip Aktif dan disusun berdasarkan klasifikasi Arsip.
- 2) Apabila seluruh Arsip Aktif yang diusulkan untuk dipindahkan telah selesai dimasukkan ke dalam Daftar Arsip, maka setelah ditandatangani oleh Arsiparis/Pengelola Arsip dan Pimpinan Unit Pengolah, Daftar Arsip dicetak/diduplikasi sejumlah 3 (tiga) rangkap.



c. Menata Arsip/Manuver Fisik

Setelah membuat Daftar Arsip, kegiatan selanjutnya adalah menata Arsip dengan cara memasukkan Arsip Aktif yang dipindahkan beserta folder ke dalam Boks Arsip. Folder dimasukkan dan diurutkan sesuai urutan dalam Daftar Arsip kemudian cantumkan nomor urut pada tab folder. Setelah Boks Arsip terisi kurang lebih  $\frac{3}{4}$  bagian, sisi lebar Boks Arsip diberi label yang berisi keterangan nomor urut Boks Arsip dan nomor urut Arsip Aktif yang ada di dalam Boks Arsip.

Contoh  
Folder dan Boks Arsip



d. Menyusun Berita Acara Pemandahan Arsip

Setelah Arsip selesai ditata secara fisik di Boks Arsip sesuai dengan Daftar Arsip yang Dipindahkan, tahapan selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah penyusunan berita acara pemandahan Arsip. Berita Acara Pemandahan Arsip dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit Kearsipan.

e. Melaksanakan Pemandahan Arsip

Memindahkan fisik Arsip aktif yang sudah memasuki masa simpan Inaktif ke unit Kearsipan. Proses pemandahan dilaksanakan secara bersama-sama oleh perwakilan Unit Pengolah dan perwakilan Unit Kearsipan. Pemandahan Arsip Inaktif dan Daftar Arsip yang Dipindahkan yang dicetak rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:

- Rangkap Pertama untuk Unit Kearsipan II.
- Rangkap Kedua untuk Unit Kearsipan I (tembusan)
- Rangkap Ketiga untuk Unit Pengolah

## Unit Kearsipan II

### a. Menerima Arsip

Menerima Arsip Inaktif yang dipindahkan dari Unit Pengolah di masing-masing lingkungan Perangkat Daerah.

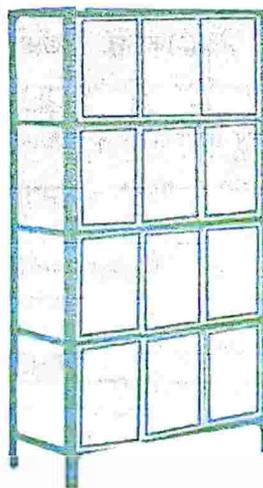
### b. Memeriksa Arsip

Unit Kearsipan II sebagai unit yang menerima dan berwenang menyimpan Arsip Inaktif selanjutnya melakukan pemeriksaan kesesuaian keberadaan dan penataan Arsip Inaktif di dalam Boks Arsip dengan Daftar Arsip yang Dipindahkan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara uji petik. Apabila ditemukan ketidakcocokan antara Arsip Inaktif dengan daftarnya maka Unit Kearsipan II menyerahkan kembali kepada Unit Pengolah yang mengusulkan pemindahan Arsip Inaktif sampai dengan diperoleh kesesuaian.

### c. Menata Arsip

Melakukan penataan Arsip pada rak Arsip berdasarkan Unit Pengolah atau series/jenis dan diurutkan sesuai nomor Boks Arsip.

Contoh  
Penataan Arsip pada Rak Arsip Rak dan Box



2. Pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari Pencipta Arsip (Unit Kearsipan II) ke Lembaga Kearsipan Daerah selaku Unit Kearsipan I.

Pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilaksanakan dari Unit Kearsipan II ke Unit Kearsipan I.

Prosedur pelaksanaannya sebagai berikut:

Unit Kearsipan II

a. Memeriksa Arsip

Petugas Unit Kearsipan II menyeleksi Arsip Inaktif yang memiliki retensi atau masa simpan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Penyeleksian dilakukan dengan cara melihat tahun penciptaan Arsip yang disandingkan dengan retensi Inaktif yang tercantum dalam JRA. Pemeriksaan Arsip juga dilakukan untuk memberkaskan Arsip/mengelompokan berdasarkan keterkaitan informasinya sesuai dengan Klasifikasi Arsip.

Contoh:

Pada Daftar Arsip Inaktif Unit Pengolah Seksi Pengembangan dan Program terdapat Arsip Inaktif tentang "X" dan pada Daftar Arsip Inaktif Unit Pengolah Seksi Pembinaan terdapat juga Arsip Inaktif yang memuat tentang "X", maka Arsip tersebut harus digabung sehingga menjadi berkas yang lengkap dan utuh serta mencerminkan tugas dan fungsi Instansi Pencipta/Perangkat Daerah.

b. Mendaftar Arsip

Arsip Inaktif yang sudah diseleksi dicatat ke dalam Daftar Arsip yang Dipindahkan sesuai dengan hasil pemeriksaan Arsip.

Contoh  
Daftar Arsip yang dipindahkan

Perangkat Daerah/Pencipta Arsip:

NO	Kode	Series/Uraian masalah	Tahun	Tingkat Perkembangan	Volume	Ket

Mengetahui,  
Kepala Perangkat  
Daerah,

Dobo, ... (tanggal/bulan/tahun)  
Kepala Unit Kearsipan II

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Cara Pengisian Daftar Arsip yang dipindahkan:

1. Nomor : Diisi Nomor Urut Arsip
2. Kode : Diisi Nomor Kode Klasifikasi Arsip sama Dengan sistim penataan
3. Series/Uraian wajib : Diisi series Arsip atau isi berkas
4. Tahun : Diisi tahun yang tercantum dalam Arsip
5. Volume : Diisi jumlah Arsip
6. Tk. : Diisi dengan tingkat keaslian Arsip Perkembangan(asli/copy/tembusan)
7. Keterangan :Diisi keterangan Unit Pengolah dan KeteranganLainnya

c. Meminta Persetujuan Unit Pengolah

Arsip Inaktif yang akan dipindahkan ke Unit Kearsipan I tetap merupakan Arsip Inaktif yang diciptakan oleh Unit Pengolah. Setelah Daftar Arsip yang Dipindahkan selesai disusun, Unit Kearsipan II meminta persetujuan Pimpinan Unit Pengolah yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Pernyataan Menyetujui.

d. Menata Arsip/Manuver Fisik

Setelah Daftar Arsip disetujui oleh PimpinanUnit Pengolah, kegiatan selanjutnya adalah menata Arsip dengan cara memasukkan Arsip aktif yang dipindahkan beserta folder ke dalam Boks Arsip. Folder dimasukkan dan diurutkan sesuai urutan dalam Daftar Arsip kemudian cantumkan nomor urut padatab folder. Setelah Boks Arsip terisi kurang lebih  $\frac{3}{4}$  bagian, sisi lebar Boks Arsip diberi label yang berisi keterangan nomor urut Boks Arsip dan nomor urut Arsip Aktif yang ada di dalam Boks Arsip.

- e. **Membuat Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif**  
Setelah Arsip selesai ditata secara fisik di Boks Arsip sesuai dengan Daftar Arsip yang Dipindahkan, tahapan selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah penyusunan berita acara pemindahan Arsip. Berita Acara Pemindahan Arsip dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah, pimpinan Unit Kearsipan II.
- f. **Melaksanakan Pemindahan Arsip Inaktif**  
Memindahkan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan I yang disertai dengan Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif dan Daftar Arsip yang Dipindahkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

#### Unit Kearsipan I

- a. **Menerima Arsip**  
Menerima Arsip Inaktif yang dipindahkan dari Unit Kearsipan II.
- b. **Memeriksa Arsip**  
Unit Kearsipan II sebagai unit yang menerima dan berwenang menyimpan Arsip Inaktif selanjutnya melakukan pemeriksaan kesesuaian keberadaan dan penataan Arsip Inaktif di dalam Boks Arsip dengan Daftar Arsip yang Dipindahkan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara uji petik. Apabila ditemukan ketidakcocokan antara Arsip Inaktif dengan daftarnya maka Unit Kearsipan II menyerahkan kembali kepada Unit Pengolah yang mengusulkan pemindahan Arsip Inaktif sampai dengan di peroleh kesesuaian.
- c. **Menata Arsip**  
Melakukan penataan Arsip pada rak Arsip berdasarkan Instansi Pencipta (Perangkat Daerah) dan nomor urut Boks Arsip. Penataan Arsip tersebut harus menganut Asas Asal-Usul (Provenance) dan Asas aturan Asli (Original Order) yang mengelompokan berdasarkan Instansi Pencipta dan pengaturan penataannya mengikuti aturan pada saat menjadi Arsip Aktif.

Contoh  
Berita Acara Pemindahan  
KOPSURATPERANGKATDAERAH  
BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF  
Nomor: \_\_\_\_\_

Pada hari ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

NIP : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Unit Kerja : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak atas nama ... (Nama Perangkat Daerah yang menerima) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyatakan telah memindahkan Arsip Inaktif sejumlah ... box yang berisi ... berkas seperti tercantum pada daftar Arsip Inaktif sesuai daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan tersebut dari PIHAK PERTAMA untuk dilaksanakan Pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing, Lembar Kesatu untuk Pihak Pertama dan Lembar kedua untuk Pihak Kedua.

PIHAKKEDUA

PIHAK PERTAMA

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

## B. Pemusnahan Arsip

1. Kaidah/Pokok/Hakikat Pemusnahan Arsip
  - a. Pemusnahan Arsip harus sesuai dengan Prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pemusnahan Arsip merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pencipta Arsip.
  - c. Pemusnahan Arsip hanya dilakukan oleh Unit Kearsipan setelah memperoleh persetujuan pimpinan Pencipta Arsip atau Kepala ANRI dan dibawah koordinasi dan tanggungjawab Unit Kearsipan Pencipta Arsip yang bersangkutan.
  - d. Pemusnahan dokumen nonArsip, blanko, amplop, undangan, dan hasil duplikasi dapat dilaksanakan secara mandiri di masing-masing Unit Pengolah.
  - e. Dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi fisik maupun informasinya.
2. Kriteria Arsip yang dimusnahkan
  - a. Tidak memiliki nilai guna (primer maupun sekunder)
  - b. Telah habis masa retensinya dan memiliki keterangan nasib akhir dimusnahkan berdasarkan JRA.
  - c. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang.
  - d. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
3. Pelaksanaan pemusnahan
  - a. Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun dilaksanakan/mejadi tanggungjawab Unit Kearsipan II di masing-masing Perangkat Daerah.
  - b. Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilaksanakan/menjadi tanggungjawab Lembaga Kearsipan Daerah.
4. Prosedur Pemusnahan Arsip  
Tahapan Prosedur Pemusnahan Arsip
  - a. Pembentukan Panitia Penilai  
Panitia Penilai Arsip ditetapkan oleh Pimpinan Pencipta Arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur:
    - Pimpinan Unit Kearsipan sebagai ketua merangkap Anggota.
    - Pimpinan Unit Pengolah/Instansi Pencipta Arsip yang Arsipnya akan dimusnahkan sebagai Anggota.
    - Arsiparis sebagai Anggota.
    - Pengelola Arsip (bagi lembaga yang belum terdapat Arsiparis).

b. Penyeleksian Arsip

Penyeleksian Arsip dilakukan oleh Panitia Penilai berdasarkan JRA. Panitia Penilai melakukan verifikasi Daftar Arsip Usul Musnah dengan JRA sudah ditetapkan dengan mengacu pada kolom jenis/series arsip, retensi Inaktif, dan keterangan nasib akhir yang menetapkan musnah atau ditinjau kembali.

Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki JRA, maka penilaian akan dilakukan oleh Panitia Penilai terhadap Daftar Arsip Inaktif dan penentuan nasib akhir berdasarkan pertimbangan nilai guna Arsip.

c. Pembuatan Daftar Arsip Usulan Musnah

Pembuatan Daftar Arsip Usulan Musnah berdasarkan hasil penyeleksian Arsip sekurang-kurangnya berisi:

- Jenis Arsip
- Nomor
- Tahun
- Jumlah
- Tingkat Perkembangan
- Keterangan

d. Penilaian oleh Panitia Penilai

Panitia Penilaian melakukan penilaian terhadap Daftar Arsip Usul Musnah dan fisik Arsip secara langsung. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam pertimbangan secara tertulis oleh Panitia Penilaian Arsip.

e. Permintaan Persetujuan Pemusnahan

Persetujuan Pemusnahan Arsip dari pimpinan pencipta Arsip dan dapat dibedakan dalam 2 (dua) cara:

- 1) Pemusnahan Arsip berdasarkan JRA yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, harus mendapatkan persetujuan terutama dari kepala ANRI. Sedangkan untuk Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun, dapat dilakukan melalui persetujuan tertulis dari Pimpinan Daerah dan ditetapkan oleh Pimpinan Pencipta Arsip yang ditembuskan kepada Kepala ANRI.
- 2) Pemusnahan tanpa JRA, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala ANRI tanpa membedakan retensinya.

f. Penetapan Arsip yang akan Dimusnahkan

Penetapan Arsip yang akan dimusnahkan harus berdasarkan kepada persetujuan Pimpinan Daerah untuk Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun dan Kepala ANRI untuk Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun. Penetapan Pemusnahan untuk Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun dilakukan oleh Pimpinan Pencipta Arsip. Penetapan Pemusnahan untuk Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dilakukan oleh Pimpinan Daerah.

g. Pelaksanaan pemusnahan Arsip

- 1) Dilaksanakan dengan menyusun Berita Acara Pemusnahan dan dilampiri Daftar Arsip Musnah dicetak rangkap 2 (Dua). Berita Acara tersebut ditanda-tangani oleh Pimpinan Unit Kearsipan, Pimpinan Pencipta Arsip, dan 2 (dua) orang saksi dari unit bidang hukum dan unit bidang pengawasan.
- 2) Dilaksanakan secara total sehingga tidak dikenali lagi baik fisik maupun informasinya, dapat dilakukan dengan cara antara lain:
  - Pembakaran;
  - Pencacahan;
  - Penggunaan bahan kimia;
  - Pulping
  - Cara lain yang memenuhi kriteria yang disebut dengan musnah.
- 3) Pelaksanaan pemusnahan harus dilaporkan pada Pimpinan Daerah.
- 4) Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pemusnahan Arsip wajib disimpan oleh Pencipta Arsip, meliputi:
  - a) Keputusan pembentukan Panitia Pemusnahan Arsip.
  - b) Notulen Rapat Panitia Pemusnahan Arsip pada saat melakukan penilaian.
  - c) Surat pertimbangan dari Panitia Penilai kepada Pimpinan Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa Arsip yang diusulkan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan.
  - d) Surat persetujuan Pemusnahan dari Pimpinan Daerah untuk Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun.
  - e) Surat Persetujuan Pemusnahan dari kepala ANRI untuk Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
  - f) Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan Arsip.
  - g) Berita Acara Pemusnahan Arsip.
  - h) Daftar Arsip Musnah.

5. Kewenangan Pemusnahan Arsip

- a. Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Pimpinan Pencipta Arsip setelah mendapat:
  - Pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip.
  - Persetujuan tertulis dari Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
  - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan II.

- b. Pemusnahan Arsip memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Aru setelah mendapat:
  - Pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip
  - Persetujuan tertulis dari Kepala ANRI
  - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip menjadi tanggungjawab Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- c. Pemusnahan Arsip tanpa JRA ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Aru setelah mendapat:
  - Pertimbangan tertulis dari Panitia Penilaian Arsip
  - Persetujuan tertulis dari Kepala ANRI
  - Pelaksanaan pemusnahan Arsip menjadi tanggungjawab Lembaga Kearsipan Daerah.

### C. Mekanisme Persetujuan Pemusnahan Arsip

1. Persetujuan pemusnahan Arsip berdasarkan JRA.
  - a. Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun.
    - 1) Pengajuan permohonan Persetujuan Pemusnahan Arsip dari Pimpinan Pencipta Arsip (Perangkat Daerah) Kepada Bupati untuk pemusnahkn Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dan telah di seleksi serta di nilai oleh Panitia Penilaian Arsip dengan kelengkapan sebagai berikut:
      - a) Surat permohonan Persetujuan yang ditandatangani oleh Pimpinan Pencipta Arsip.
      - b) Surat pertimbangan dari panitia Penilaian Arsip.
      - c) Daftar Arsip Usul Musnah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
      - d) Daftar Arsip Usul Musnah ditandatangani oleh Pimpinan Pencipta Arsip dan diparaf oleh Ketua Panitia Penilai Arsip atau Pimpinan Unit Kearsipan II.
    - 2) Penelaahan surat beserta daftar Arsip Usul Musnah Surat beserta Daftar Arsip Usul Musnah yang diajukan kepada Bupati selanjutnya di telaah dengan tahapan sebagai berikut:
      - a) Bupati memberikan disposisi kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten untuk menindaklanjuti permohonan persetujuan dengan melakukan penelaahan terhadap Surat Permohonan Pesetujuan Pemusnahan Arsip dan kelengkapannya.
      - b) Pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah memberikan disposisi kepada unit yang membidangi penilaian Arsip dilingkungannya.

- c) Unit yang membidangi penilaian Arsip bersama Arsiparis melakukan penelaahan dan dapat berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi Pencipta Arsip yang mengusulkan Pemusnahan Arsip.
  - d) Unit yang membidangi penilaian Arsip menyampaikan hasil tertulis penelaahan dari Panitia Penilai kepada Pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah secara berjenjang disertai konsep Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip beserta Daftar Arsip Persetujuan Musnah yang akan ditandatangani Bupati dan diparaf oleh Arsiparis yang menelaah, Pimpinan Unit Penilaian Arsip, dan Pimpinan lembaga kearsipan Daerah.
- 3) Pemberian Persetujuan Pemusnahan Arsip
- a) Penyampaian Telaah tertulis terhadap Usul Pemusnahan Arsip dan Konsep surat persetujuan pemusnahan Arsip beserta lampirannya dari Lembaga Kearsipan Daerah kepada Bupati.
  - b) Bupati menandatangani Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip dan lampirannya. Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip dan lampirannya dibuat rangkap 2 (dua) rangkap.
  - c) Penyampaian Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip kepada Instansi Pencipta Arsip (Perangkat Daerah) dengan rincian 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Instansi Pencipta Arsip (Perangkat daerah), 1 (satu) rangkap disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah.
  - d) Surat persetujuan Bupati yang dilampiri Daftar Arsip Persetujuan Musnah disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pencipta Arsip (Perangkat Daerah) untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar Surat Penetapan Arsip Musnah beserta Daftar Arsip Musnah. Surat Penetapan Arsip Musnah. Surat Penetapan Arsip Musnah beserta lampiran dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan rincian 1 (satu) rangkap ditembuskan kepada Lembaga Kearsipan Daerah.
- b. Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) tahun
- 1) Permintaan persetujuan pemusnahan Arsip yang memiliki retensi sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang telah diseleksi dan dinilai oleh Panitia Penilai Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Kepada Kepala ANRI dilengkapi dengan :

- a) Surat Permohonan persetujuan yang ditandatangani oleh Pemimpin Daerah.
  - b) Surat pertimbangan dari Panitia Penilai Arsip.
  - c) Daftar Arsip Usul Musnah dalam bentuk *hardcopy* dan *Softcopy*.
- 2) Daftar Arsip Usul Musnah yang telah diterima oleh Kepala ANRI kemudian akan ditelaah oleh unit yang menangani bidang penilaian Arsip.
  - 3) Pemimpin Unit yang mempunyai fungsi dan kewenangan dalam penilaian arsip bersama Arsiparis akan melakukan penelaahan dan jika diperlukan berkoordinasi dengan Lembaga Kearsipan Daerah.
  - 4) Unit yang mempunyai fungsi dan kewenangan dalam penelaahan Arsip di ANRI menyampaikan hasil penelaahan kepada pemimpin ANRI secara berjenjang disertai konsep surat persetujuan pemusnahan arsip yang akan ditandatangani kepala ANRI beserta lampiran berupa daftar ARSIP persetujuan musnah yang ditandatangani oleh Arsiparis yang melakukan telaah, pimpinan unit yang mempunyai fungsi dan kewenangan dalam penelaahan Arsip.
  - 5) Kepala ANRI menandatangani surat persetujuan pemusnahan Arsip dan lampirannya berupa dilampiri daftar Arsip persetujuan musnah.
  - 6) Surat persetujuan pemusnahan kepala ANRI beserta lampiran daftar Arsip persetujuan musnah disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan daftar Arsip musnah.

## 2. Pemusnahan Arsip tanpa JRA

Persetujuan pemusnahan Arsip tanpa JRA berlaku untuk semua jenis / series Arsip dan tidak terbatas pada Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) tahun. Pengajuan permintaan melalui surat permohonan persetujuan pemusnahan Arsip dan daftar Arsip usul musnah yang ditandatangani oleh pimpinan daerah. Untuk mekanisme selanjutnya sama dengan proses pemberian selanjutnya pada usul pemusnahan Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Contoh  
Formulir Daftar Arsip Usul Musnah

NO	JENIS ARSIP	TAHUN	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	KETERANGAN

**Keterangan Kolom**

- Nomor : Menunjukkan nomor jenis Arsip  
Jenis Arsip : Menunjukkan Jenis Berkas atas dasar series  
Tahun : Menunjukkan Tahun Pembuatan Arsip  
Jumlah : Menunjukkan Jumlah Berkas Arsip misalnya 3 folder  
Tingkat : Menunjukkan Pada tingkat asli, copy, atau  
Perkembangan tembusan  
Keterangan : Menunjukkan pada informasi lainnya terkait Arsip misalnya Rusak, tidak lengkap, berbahasa asing, dll.

Contoh  
Surat Pertimbangan Panitia Penilaian Arsip

SURAT PERTIMBANGAN PANITIA PENILAIAN ARSIP

Berkenaan dengan permohonan persetujuan pemusnahan Arsip berdasarkan Surat Permohonan nomor ... tanggal ... , dalam hal ini telah dilakukan penilaian Arsip dari tanggal ... s/d ..., terhadap :

- b. Arsip; dan
- c. Unit Pencipta/Perangkat Daerah

Dengan menghasilkan pertimbangan menyetujui usulan pemusnahan Arsip sebagai terlampir pada daftar Arsip, namun ada beberapa berkas yang dipertimbangkan agar tidak dimusnahkan karena mempunyai nilai sekunder sebagaimana terlampir (Daftar Arsip yang dipertimbangkan).

Demikian pertimbangan panitia penilai, dengan harapan permohonan persetujuan usul pemusnahan arsip dapat ditindaklanjuti dengan cepat melalui prosedur yang telah ada

Dobo, .....

a. Ketua :

.....

(NIP, Jabatan)

b. Anggota :

.....

(NIP, Jabatan)

c. Anggota :

.....

(NIP, Jabatan)

d. Anggota :

.....

(NIP, Jabatan)

e. Anggota :

.....

(NIP, Jabatan)

#### D. Penyerahan Arsip

Penyerahan Arsip dilakukan terhadap Arsip Inaktif yang memiliki nilai guna sekunder yang skala Pemerintahan Kabupaten ke Lembaga Kearsipan Daerah oleh Unit Kearsipan II dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Arsip yang mempunyai nilai guna parmanen, telah habis masa simpannya dan dinyatakan tidak diperlukan lagi dalam kegiatan Instansi Pencipta Arsip.
2. Penyerahan Arsip Statis Kepada Lembaga Kearsipan Daerah dilakukan paling sedikit satu kali dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Penyerahan Arsip Statis dilakukan sebagai berikut:

1. Memeriksa dan meneliti Arsip yang sudah habis masa retensinya dan berketerangan permanen sesuai JRA serta masih memiliki nilai guna sekunder atau kesejarahan.
2. Arsip yang sudah diperiksa di kelompokkan berdasarkan jenis/series Arsip sesuai JRA dan klasifikasi Arsip.
3. Jenis / Series yang akan diserahkan disusun dalam daftar Arsip.
4. Arsip yang akan diserahkan dimasukkan dalam folder dengan mencantumkan nomor Arsip sesuai dengan nomor yang tercantum dalam Daftar Arsip.
5. Arsip yang sudah dimasukkan dalam folder dimasukkan ke dalam Boks Arsip dan pada sisi lebar Boks Arsip diberi label dan dicantumkan nomor serta nomor urut Arsip yang ada dalam Boks Arsip tersebut.
6. Arsip yang akan diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru terlebih dahulu diperiksa ulang oleh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
7. Penyerahan Arsip statis dilaksanakan dengan Keputusan Bupati dengan membuat Berita Acara Penyerahan Arsip Statis dibuat dalam rangkap 2 (dua) yaitu :
  - Rangkap pertama ditujukan untuk perangkat Daerah
  - Rangkap kedua ditujukan untuk Lembaga Kearsipan Daerah
8. Arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan Arsip Statis diberlakukan sebagai Arsip Vital.

Contoh  
Daftar Arsip Statis

Intansi : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_

No	Jenis / Series Arsip (Uraian Berkas)	Tahun / Jumlah	Ket

Dobo, ...

Kepala ...

(.....)

**Keterangan :**

- Nomor : Diisi Nomor Jenis Arsip
- Jenis Arsip : Diisi Nama Jenis/Series atau Isi Berkas
- Tahun : Diisi Tahun yang tercantum dalam Arsip
- Jumlah : Diisi Jumlah Arsip
- Tingkat Perkembangan : Diisi Tingkat Perkembangan Arsip (Asli / Tembusan / Fotocopy)
- Keterangan : Diisi keterangan lainnya yang diperlukan misalnya kondisi kertas, bahasa asing, dll.

BERITA ACARA

NOMOR: \_\_\_\_\_  
TENTANG PENYERAHAN ARSIP STATIS

Padahari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

NIP: \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Instansi) yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : \_\_\_\_\_

NIP : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menyerahkan arsip statis sebagaimana tercantum dalam Daftar Arsip kepada PIHAK KEDUA untuk dilestarikan di Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten Kepulauan Aru

Yang Menerima  
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan  
PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Mengetahui  
Bupati Kepulauan Aru

(.....)

E. Penutup

Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Pedoman Penyusutan Arsip ditetapkan dalam rangka mewujudkan tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

9 BUPATI KEPULAUAN ARU, 8



JOHAN GONGA